

BAB IV

PERJUANGAN SUTAN SYAHRIR

A. Dalam lapangan politik (1945 - 1949)

Setelah terbit Maklumat X Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1 November 1945, dibentuklah partai-partai politik seperti Masyumi, Partai Sosialis, Partai Nasional Indonesia dan sebagainya. Partai-partai itu berbeda dalam sikap pendirian menghadapi pihak Belanda. Sebagian menyetujui diplomasi atau berunding dengan Belanda. Sebagian lagi menolak politik demikian. Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka berteguh pendirian, yaitu pengakuan atas kemerdekaan 100% dan mengusir seluruh tentara asing dari daratan dan lautan Indonesia. Dengan demikian mereka lebih mengutamakan perlawanan dan revolusi dan tidak bertindak sebagai negara yang berdaulat.¹

Sutan Syahrir di awal perang kemerdekaan berusaha memanfaatkan situasi revolusioner untuk mencapai kekuasaan, tetapi kemudian dia malah berusaha mengekang faktor-faktor ini untuk mencapai suatu penyelesaian diplomatis dengan Belanda. Dia berjasa menciptakan suatu sistem pemerintahan parlementer sejak bulan November 1945 dengan maksud

¹Rosihan Anwar, Soebandrio Sastrosatomo, Pengemban Misi Politik, Grafiti, Jakarta, 1995, hal. 117.

menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Keistimewaannya adalah dia dapat melihat jauh ke depan seperti tampak dalam tulisannya, yang dikutip oleh R. Z. Leirissa: **“Perjuangan Kita”** (November 1945). Dia berpendapat bahwa revolusi Indonesia tidak seluruhnya nasional dan tidak seluruhnya sosialis. Selanjutnya, harus ada kerja sama dengan pihak luar negeri untuk membangun Indonesia yang kaya alamnya. Revolusi Indonesia menurut Syahrir adalah revolusi yang demokratis. Mengenai golongan adat yang bekerja sama dengan Belanda sebagai birokrat, dia berpendapat bahwa mereka harus digeser perlahan-lahan dan diberi fungsi penasehat ahli dalam bidang pemerintah. Selain itu, diapun setuju bahwa feodalisme harus diakhiri.²

Sebab itulah Syahrir berusaha menciptakan lembaga-lembaga parlementer seperti lazimnya terdapat dalam sistem politik yang demokratis di dunia Barat. Lembaga-lembaga itu adalah :

1. KNIP yang pada tanggal 16 Oktober 1945 dinyatakan sebagai lembaga legislatif (oleh Hatta) dengan Badan Pekerja (BP) untuk tugas sehari-hari dengan Syahrir sebagai temannya.

²R.Z. Leirissa, Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900 - 1950, Akademi Presindo, Jakarta, hal. 97.

1. Partai-partai politik diizinkan berdiri melalui peraturan tertanggal 3 November 1945.
2. Mengumuman sebuah "Manifesto Politik" pada tanggal 1 November 1945 untuk menjelaskan garis-garis perjuangannya.
3. KNIP di setiap daerah yang berdiri sejak Agustus 1945 (kelanjutan dari Hokokai) diubah untuk itu perlu diadakan pemilihan dan pembentukan Badan Pekerja di daerah untuk membantu kepala daerah dalam tugas eksekutif.
4. Pembentukan Kabinet Syahrir yang bertanggung jawab pada KNIP, pada tanggal 4 November 1945, untuk menggantikan Kabinet Soekarno yang terbentuk pada tanggal 18 Agustus 1945.³

Perubahan-perubahan kelembagaan tersebut ini tidak dicapai melalui prosedur parlementer, tetapi dengan persaingan kekuatan antara kedua pihak yaitu Soekarno - Hatta, Syahrir dan Tan Malaka. Tan Malaka sejak 15 Agustus 1945 telah kembali ke Jakarta sesudah merantau di luar negeri bertahun-tahun. Tan malaka mula-mula bertemu dengan Soekarno, lalu membantu Soebardjo dalam Kabinet Soekarno. Pada 10 Oktober 1945, Tan Malaka bertemu dengan Soekarno dan memaksakan Soekarno

³*Ibid*, hal. 98.

menandatangani suatu surat wasiat yang isinya antara lain menyatakan bahwa Inggris menangkap Soekarno, maka Tan Malaka akan menggantikan sebagai Presiden. Karena harapan itu tidak terlaksana maka Tan Malaka menggalang kekuatan sendiri dan melawan Soekarno maupun Syahrir.⁴

Untuk menguasai pemuda pada tanggal 10 November 1945 pemerintah memprakarsai Kongres Pemuda di Yogyakarta. Namun hanya sebagian dari organisasi pemuda yang menerima gagasan Amir Syarifudin untuk mendirikan PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia). Sebagian terbesar dari organisasi pemuda bergabung dengan organisasi tersendiri. Sikap Kabinet Syahrir terhadap partai-partai juga sangat selektif. Partai yang pemimpin- pemimpinnya bekerja sama dengan Jepang tidak disukainya karena sikapnya yang anti hal-hal yang berbau Jepang. Salah satu partai besar yang menentanginya adalah PNI. Masyumi menentanginya pula karena kurang menempatkan orang-orang partai itu dalam kabinet. Jadi perlawanan bukan karena isu-isu politik tetapi justru karena perbedaan nilai-nilai budaya yang melatar belakangi partai-partai itu. Partai dari Syahrir dan Amir Syarifudin adalah Partai Sosialis yang digabung pada bulan November 1945 dari gabungan antara Partai Sosialis Indonesia (Parsi) dari Amir Syarifudin

⁴ *Ibid.*, hal. 99.

yang terdiri dari bekas-bekas Garindo dan PKI Illegal dan dari Syahrir yang terdiri dari bekas-bekas PNI baru (baru pada tahun 1948 mereka pecah lagi).

Syahrir mendapat tugas sebagai orang kepercayaan Hatta untuk membantu Golongan-golongan Merdeka eks PNI yang tidak mau masuk Partindo (Partai Indonesia), dalam merumuskan asas-asas perjuangan dan program politik Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI - baru, yang didirikan sebagai organisasi pendidikan kader politik untuk perjuangan kemerdekaan, kedaulatan rakyat dan martabat manusia.⁵

Garis perkembangan selama perang Kemerdekaan adalah : perbedaan dan pertentangan antara golongan yang memihak pada "diplomasi" dan garis "perjuangan" yang terutama diperlihatkan oleh para pemuda dalam bulan-bulan Agustus - Desember 1945.

Mula-mula Tan Malaka mencoba memainkan kekuatan-kekuatan revolusioner pemuda untuk maksud-maksudnya. Pada Januari 1946, Tan Malaka membentuk suatu wadah yang bernama "**Persatuan Perjuangan**". Semboyannya adalah "merdeka 100%" dan menentang perundingan-

⁵Siti Wahyunah Syahrir, Bung Hatta: Beberapa Catatan, dalam Meutia Farida Swasono, Bung Hatta Pribadinya dalam kenangan, Sinar Harapan, Jakarta, 1981, hal. 478.

perundingan yang dilakukan Syahrir. Kemerdekaan harus diperoleh dengan cara perjuangan senjata. Hampir setiap golongan dan partai, menyetujui semboyan ini. Di mana-mana didirikan cabang-cabang Partai Politik sekalipun yang berkuasa di cabang-cabang Partai Politik itu bisa berbeda-beda aliran dan menentang ideologi Marxis dari Tan Malaka. Gambaran ini berhasil mengalahkan Syahrir sehingga dia harus melepas jabatan sebagai Perdana Menteri pada bulan Januari 1946. Persoalannya adalah perundingan Syahrir dengan Belanda. Masyumi dan PNI berpidato dari Banten sampai Malang dan akhirnya mengangkat Syahrir lagi sebagai Perdana Menteri. Soekarno tetap percaya bahwa diplomasi adalah jalan yang paling baik, meskipun banyak pemimpin Indonesia ketika itu.⁶

Pada bulan pertama tahun 1946 rupanya di kalangan kaum partisi Indonesia terdapat dua pendapat yang berbeda tentang strategi perjuangan mempertahankan negara Republik Indonesia di bidang diplomasi. Di satu pihak berpendapat bahwa perundingan dengan Belanda dapat dilaksanakan apabila Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 100% terlebih dahulu. Pendapat pertama dilaksanakan oleh kaum politisi yang pada saat sedang menjalankan beleid (kebijaksanaan) pemerintah kabinet (Dewan Menteri)

⁶R. Z. Leirissa, *opcit*, hal. 100.

dengan Perdana Menteri Sutan Syahrir sebagai pelopornya. Sedangkan pendapat yang kedua didukung oleh kaum oposisi terhadap kebijaksanaan pemerintahan Kabinet Sutan Syahrir, dengan Tan Malaka sebagai pemukanya.

Demikianlah untuk memperkuat barisan oposisinya, Tan malaka berusaha menggalang solidaritas nasional dengan mengundang rapat 300 delegasi dari organisasi partai politik dan militer Republik Indonesia di Purwokerto (Banyumas) pada 4-5 Januari 1946. Rapat tersebut kemudian berhasil membentuk wadah persatuan kaum oposisi dengan nama "Persatuan Perjuangan". Musyawarah "Persatuan Perjuangan" dilanjutkan pada 15 Januari 1946 di Surakarta. Musyawarah itu menghasilkan program minimum yang terdiri dari tujuh pokok yaitu :

1. Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%
2. Pemerintah rakyat
3. Tentara rakyat
4. Melucuti tentara Jepang
5. Mengurus tawanan bangsa Eropa
6. Menyita dan menyelenggarakan perkebunan (musuh)
7. Menyita dan menyelenggarakan perindustrian (musuh : pabrik, bengkel,

tambang dan lain-lainnya).⁷

Program minimum “**Persatuan Perjuangan**” itu berhasil mengikat organisasi-organisasi sefaham, sehingga dalam beberapa bulan saja anggotanya menjadi 141 organisasi. Program minium tersebut kemudian disodorkan sebagai tuntutan revolusirakyat Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia (Kabinet Sutan Syahrir), yang menurut penglihatan Persatuan Perjuangan terlalu banyak memberikan konsesi kepada pihak Belanda dalam rundingan-rundingan yang telah dilakukannya. Akibatnya di dalam sidang KNIP di Solo (28 Februari samapi 2 Maret 1946) mayoritas suara menentang kebijaksanaan Sutan Syahrir. Karena oposisi yang terlalu kuat itu Kabinet Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepda Presiden. Tetapi kemudian Presiden menunjuk kembali Sutan Syahrir sebagai Formatur kabinet dan kemudian dia menjabat sebagai Perdana Mentri (Kabinet Syahrir II) 12 Maret 1946.⁸

Dengan terbentuknya Kabinet Syahrir II itu pada tanggal 12 Maret 1946 berarti suatu kekalahan golongan “**Persatuan Perjuangan**”, maka

⁷Heru Sukardi, Soewarno, Ny. Umiati RA, Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 - 1949) Daerah Jawa Timur, depdikbud, Jakarta, 1991, hal. 169.

⁸Ibid, hal. 170.

dari itu pihak “ **Persatuan Perjuangan** berusaha meningkatkan oposisinya dengan mengadakan rapat raksasa di Madiun pada pertengahan bulan Maret 1946. Tetapi pihak pemerintah tidak tinggal diam sehingga pada tanggal 17 Maret 1946 Tan Malaka dan enam orang pemimpin “**Persatuan Perjuangan**” lainnya (Abikusno Cokrosuyoso, Khoirul Saleh, Sukarni, Suprpto, Moh. Yamin dan Wondoamiseno) ditangkap dan ditawan di Tawangmangu.

Setelah Kabinet Syahrir II terbentuk pada 29 Juni 1946 kedua belah pihak berunding lagi dengan perantaraan Sir Archibald Clark Kerr dan Inggris. Perundingan-perundingan itu dilanjutkan pada bulan April 1946 di Hoge Velowe, negeri Belanda.⁹

Sekalipun perundingan itu tidak menghasilkan kesepakatan, di Hoge Velowe telah dicapai beberapa prinsip, yaitu pengakuan de facto atas Republik Indonesia (sekalipun atas Pulau Jawa saja) dan kemerdekaan Indonesia dalam bentuk federal setelah masa peralihan tertentu. Kenyataannya ketika itu Republik Indonesia berkuasa atas pulau Jawa dan Pulau Sumatra, sedangkan Belanda telah berhasil membangun kekuasaannya

⁹A. B. Laplan dan P.J. Drooglever, Menelusuri Jalur Linggarjati Diplomasi Dalam Perspektif Sejarah, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992, hal. 3.

di pulau-pulau lainnya. Prinsip-prinsip Hoge Velowe sesungguhnya menyediakan landasan bagi perjanjian Linggarjati yang secara resmi menerima prinsip-prinsip itu.

Gagalnya Hoge Velowe bukan karena kedua delegasi tidak bisa mencapai persetujuan. Kegagalan itu disebabkan oleh tantangan-tantangan yang kuat di Belanda dan Indonesia. Di negeri Belanda pihak pemerintah kurang memberi dukungan antara lain karena menghadapi pemilihan umum, sedangkan di Indonesia kelompok-kelompok masyarakat tertentu menentang dan menculik Sutan Syahrir sehingga kabinetnya jatuh lagi untuk yang kedua kalinya.

Pada 2 Oktober 1946 Kabinet Syahrir III dilantik, karena Kabinet Syahrir II telah jatuh pada bulan Juni 1946 (27 Juni 1946 Sutan Syahrir diculik). Kabinet ini melangsungkan perundingan dengan pihak Belanda. Setelah beberapa kali melangsungkan perundingan dengan pihak Belanda di Jakarta, maka pada 10 November 1946 berlangsunglah puncak perundingan Republik Indonesia - Belanda di Desa Linggarjati, yang letaknya 22 Km dari Cirebon, di lereng gunung Cerme, di daerah yang dikuasai Republik Indonesia, dengan maksud agar perundingan itu dapat dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Perundingan telah dimulai pukul

15.00 sore bertempat di penginapan Lord Killearn dan perundingan diketuainya sendiri.

Di dalam perundingan ini hadir pihak-pihak :

1. Inggris, sebagai pihak penengah Lord Killearn.
2. Republik Indonesia, dengan wakil-wakilnya, yaitu Sutan Syahrir (Ketua), dari Partai Sosialis, Drs. Susanto Tirtoprojo, SH. (anggota), dari PNI, Drs. Adnan Kapau (AK) Gani (anggota), dari Masyumi, Dr. Sudarsosno (anggota) dan Dr. Leimena (anggota).
3. Belanda, dengan wakil-wakilnya Prof. W. Schermerhorn (Ketua), D. De Boer, Max Van Poll dan Dr. Hubertus Van Mook (anggota).

Pada 12 November 1946 persetujuan tercapai dan diparaf di Jakarta pada 15 November 1946 oleh Republik Indonesia (diparaf oleh Sutan Syahrir) dan dari pihak Belanda (Prof. Schermerhorn). Persetujuan inilah yang kemudian terkenal dengan nama "**Persetujuan Linggarjati**". Naskah persetujuan ini terdiri atas 17 pasal, yang isi pokoknya antara lain :

1. Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah Republik Indonesia de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang de facto diduduki Belanda dengan berangsur-angsur dan kerja sama diantara kedua pihak, akan dimasukkan ke daerah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949.

2. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda akan bekerja sama untuk membentuk Negara Indonesia Serikat. Negara Indonesia Serikat akan terdiri dari : Republik Indonesia, Kalimantan dan Timur Besar. Pembentukannya supaya sebelum tanggal 1 Januari 1949.
3. Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan bekerja sama untuk membentuk Uni Netherland - Indonesia dengan Raja Belanda sebagai Kepala Uni.¹⁰

Naskah tersebut walaupun sudah diparaf oleh ketua delegasi masing-masing, namun belum dianggap sah karena harus mendapatkan persetujuan dari Parlemen masing-masing. Masih ada waktu beberapa bulan untuk merundingkan, menolak atau menerima naskah itu.

Di Negeri Belanda, Linggarjati mendapat tantangan yang kuat. Orang disana antarlain berpendapat bahwa terlalu banyak kekuasaan yang akan diberikan kepada Republik Indonesia selama masa peralihan tersebut. Maka kabinet Belanda memutuskan untuk mengalihkannya sesuai dengan keinginannya dan mengajukan pertanggung jawaban kepada Parlemen. Pihak kabinet dan Parlemen Belanda berunding selama satu setengah bulan.

¹⁰Heru Sukardi, *opcit*, hal 172-173

Sementara itu di Indonesia situasi militer memburuk, tentara dari kedua belah pihak mulai saling menyerang.

Di Indonesia pun, Linggarjati mendapat tantangan yang kuat dari berbagai kelompok masyarakat. Namun agar KNIP (Parlemen Republik Indonesia di masa itu) bisa meratifikasikan naskah itu, Presiden Soekarno mengeluarkan pengumuman untuk menambah jumlah anggota.

Akhirnya, pada tanggal 25 Maret 1947 delegasi Republik Indonesia yang dipimpin Sutan Syahrir dan delegasi Belanda yang dipimpin Schermerhorn menandatangani persetujuan itu. Namun kedua belah pihak tetap mempertahankan hak untuk membuat interpretasi sendiri.

Usaha mempertahankan persetujuan itupun akhirnya kandas. Perbedaan pendapat tetap timbul, yaitu mengenai status Republik Indonesia dan Belanda dalam masa peralihan serta hubungan antara Belanda dan Indonesia setelah pengakuan kedaulatan. Belanda, umpamanya, menginginkan adanya suatu Uni Belanda - Indonesia dengan pimpinan Ratu Belanda. Karena upaya kompromi gagal, maka pada bulan Juli 1947 pihak Belanda melancarkan Agresi Pertama dengan tujuan memaksa Republik Indonesia menerima visi Belanda mengenai Linggarjati.¹¹

¹¹A. B. Laplan, *opcit*, hal. 4-5.

Dari Persetujuan Linggarjati, ada pengakuan bahwa negara ini, Republik Indonesia, lahir secara revolusioner. Maksudnya, persetujuan itu dihasilkan dari perundingan antara dua bangsa, dua negara. Pengakuan bahwa bangsa Indonesia menggunakan hak menentukan nasib sendiri secara revolusioner, tidak minta kemerdekaan dari Belanda atau dari siapapun. “Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah”, kata Soebadio Sastrosatomo (72), salah seorang pelaku di balik layar perundingan Linggarjati kepada Kompas.¹²

“Persetujuan Linggarjati memberi pengakuan de facto kepada Republik Indonesia, yang berarti bahwa bangsa Indonesia sudah berhak mempunyai perwakilan diplomatik sendiri di luar negeri dan bahwa tentara Indonesia secara resmi diakui sebagai tentara Republik Indonesia”, kata Aboe Bakar Lubis dalam tulisannya berjudul **Masa Revolusi Yang Terkenang** yang dikutip oleh Harian Kompas.¹³

Perundingan antara Indonesia dan Belanda sekitar Persetujuan Linggarjati dalam beberapa hal ada juga mendapat kemajuan, tetapi keadaan menjadi suram kembali, karena pada tanggal 27 Mei 1947 komisi Jenderal

¹²Soebadio Sastrosatomo, **Arti Persetujuan Linggarjati**, Kompas, Jakarta, 15 Oktober 1991, hal.16

¹³Aboe Bakar Lubis, **ibid**, hal. 16.

Belanda menyampaikan Nota Ultimatif yang mesti dijawab oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam waktu 14 hari.

Nota Belanda ini yang kemudia ternyata menjadi benih kegagalan dalam perundingan Indonesia - Belanda anatar lain adalah:

1. Membentuk bersama suatu Pemerintah Peralihan.
2. Mengeluarkan mata uang bersama dan mendirikan Lembaga Devisa Bersama.
3. Republik Indonesia supaya mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah pendudukan Belanda.
4. Menyelenggarakan bersama ketertiban dan keamanan di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah Republik Indonesia yang memerlukan bantuan Belanda.
5. Menyelenggarakan penilaian bersama atas import dan export.

Atas Nota Komisi Jenderal Belanda itu pihak Delegasi Indonesia padatanggal 8 Juni 1947 menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Setuju membentuk suatu Pemerintah Peralihan yang mempunyai kewajiban membuat persiapan sidang konstituante dan mempersiapkan penyerahan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Federal Nasional.

2. Setuju mendirikan Lembaga Devisa untuk seluruh Indonesia, sesudah terbentuk pemerintah Peralihan.
3. Hendaknya disusun Badan Pusat Pembagian makanan untuk seluruh Indonesia oleh Pemerintah Peralihan tersebut.
4. Kewajiban mengurus ketertiban dan keamanan di daerah Republik Indonesia sendiri.
5. Perdagangan export dan import dijalankan menurut petunjuk dari Pemerintah Peralihan.
6. Soal-soal besar yang mengenai penyelenggaraan Persetujuan Linggarjati diurus oleh kedua delegasi. Keputusan-keputusan kedua delegasi tersebut dijalankan oleh Pemerintah Peralihan dan negara-negara bagian.¹⁴

Nota Belanda yang ultimatif menimbulkan ketegangan di bidang politik yang menimbulkan kegiatan-kegiatan diplomatik Konsol Jenderal Tiongkok (Cina).

Pada 21 Juni 1947 menteri-mentri Mr. Moh. Roem, Mr. Amir Syarifudin, Hamengkubuwono dan Mr. Abdul Madjid terbang ke Jakarta atas panggilan P.M. Sutan Syahrir karena gentingnya keadaan politik.

¹⁴Badan Pemurnia, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Minangkabau 1945-1950, Jakarta, 1978, hal. 478.

Pada tanggal 23 Juni 1947 Dr. Van Mook dan Dr. Koets selaku wakil Pemerintah Belanda mengunjungi Perdana Menteri Sutan Syhrir untuk menyampaikan Aide Memoire Pemerintah Belanda sebagai yang diputuskandalam sidang kabinetnya. Aide Memoire tersebut mengharap supaya nota Komisi Jenderal Belanda tanggal 27 Mei 1947 diterima sepenuhnya. Jawaban dari pihak Indonesia dinantikan sampai 27 Juni 1947.

Pada tanggal 25 Juni 1947 Kabinet Republik Indonesia mengadakan sidang di Yogya untuk meninjau keadaan politik. Dalam sidang ini keterangan perdana menteri Sutan Syahrir menimbulkan debat yang hangat. Suasana politik panas. Kabinet Syahrir tidak dapat bertahan lama. Pada tanggal 26 Juni 1947 jam 11 malam Kabinet Syahrir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden.¹⁵

Pada tanggal 8 Oktober 1947, delegasi Republik Indonesia diangkat untuk putaran baru perundingan. Amir Syarifudin, perdana menteri, menjadi ketua, Iskaq Cokroadisuryo, rekan lama Sukarno sebagai sekretaris, Ali Sastroamijoyo, Haji Agus Salim, Tjoa Sek Ien (mewakili minoritas Cina), dr. Djoeanda dan Sutan Syahrir dalam susunan ini, tercantum dalam daftar

¹⁵ *Ibid*, hal. 479.

anggota delegasi.¹⁶

Konferensi delegasi Belanda dan Indonesia di bawah pengawasan PBB diharapkan dimulai bulan Desember 1947. Pada tanggal 19 Januari 1948, Perjanjian Renville ditandatangani. Wilayah Republik Indonesia selama masa peralihan sampai penyelesaian akhir dicapai, bahkan akan terbatas lagi ketimbang persetujuan Linggarjati: hanya meliputi Jawa Tengah dan ujung barat Pulau Jawa - Banten tetap daerah Republik Indonesia. Tuntutan Republik Indonesia tidak diperhatikan, supaya selama masa peralihan, dihormati sepenuhnya untuk mengurus sendiri urusan luar negerinya. Ini konsesi yang menyakitkan bagi Republik Indonesia. Namun, Republik Indonesia tidak dihancurkan seperti tujuan Belanda semula. Perdana menteri Belanda menjelaskan mengapa persetujuan itu ditandatangani Belanda, tidak boleh "menimbulkan rasa benci Amerika"

Sedikit banyak, ini merupakan ulangan dari apa yang terjadi selama dan sesudah perundingan Linggarjati, melalui persetujuan Renville. Sukarno dan Hatta dijadikan lambang kemerdekaan Indonesia dan persatuan Yogyakarta hidup lebih lama, jantung Republik terus berdenyut.

¹⁶Rudolf Mrazek, Syahrir, Politik dan Pengasingan di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996, hal. 647.

Ini kembali inti keuntungan. Seperti sesudah persetujuan Linggarjati, juga pribadi lain yang jauh dari pusat diidentifikasi dengan persetujuan - dulu Perdana Menteri Syahrir, kini Perdana Menteri Amir - yang dianggap langsung bertanggung jawab jika sesuatu salah atau kelihatan salah.¹⁷

Sejak perjanjian Renville ditandatangani dan diumumkan maka seluruh pasukan bersenjata harus meninggalkan front-front pertempuran walaupun dengan perasaan yang kesal, karena pada umumnya perundingan itu pihak Indonesia banyak yang dirugikan. Front-front pertempuran dimana saja dipertahankan mati-matian.

Menjadi kenyataan bahwa setiap menghadapi front. Pejuang republik Indonesia Tentara Belanda terpaksa memecah-mecah pasukannya untuk menghadapi pertahanan Tentara Republik. Sudah menjadi sifat Belanda apabila mereka sudah merasa lemah, maka Belanda tidak segan-segan mengajak berunding.

Tidak saja di bidang militer mereka susun kekuatan tetapi dalam bidang politiknya mereka konsolidasi dengan mempergunakan Politik **"Devide At Impera"**. Mereka mengadakan pecah belah tidak saja

¹⁷ *Ibid*, hal. 649.

dikalangan rakyat, tetapi dikalangan pemimpin-pemimpin pun mereka mereka lakukan pecah belah. Mereka tidak segan-segan memilih pemuka-pemuka rakyat yang mereka anggap memihak kepada mereka. Kemudian mereka angkat menjadi anggota Dewan untuk mewakili rakyat menentang Republik Indonesia.¹⁸

Pada tanggal 1 Agustus 1948, Soeripno kembali ke Yogyakarta dari misi untuk Republik Indonesia di luar negeri. Dia membawa seseorang, Muso Manover, pria yang menjadi bagian dari eksekutif Partai Komunis Indonesia sebelum perang, pemimpin pemberontakan Komunis gagal di tahun 1926 - 1927, yang sejak itu hidup dalam pengasingan di Moskow. Dalam waktu singkat, banyak yang cepat bergabung dengannya, antara lain Abdul Madjid dan Setiadjid. Muso berhasil memegang pimpinan sayap gerakan sosialis Indonesia dari Amir Syarifuddin.

Pada tanggal 1 September 1948, Amir Syarifuddin kehilangan pijakan dan bukannya memperoleh anfaat dengan kedatangan Muso yang menyatakan bahwa dia sebenarnya anggota "Partai Komunis Indonesia" selama bertahun-tahun dan sejak sebelum perang, dia juga berkata, bahwa

¹⁸Let. Kol. Pur Mansyur, The Golden Bridge "Jembatan Emas" 1945, Jakarta, hal. 570.

Syahrir menafsirkan Peristiwa Madiun sebagai konflik dengan dinamikanya yang terkurung di dalam pusat politik di Yogyakarta - pusat dengan Hatta sebagai wakil dan Amir Syarifuddin yang tidak cukup kuat untuk melepaskan diri. Sesudah peristiwa Madiun, politik di Indonesia ditundukkan oleh partai-partai massa dengan pengikut yang tidak terdidik, dipimpin oleh mereka yang memutuskan sendiri semua kebijakan partai, partai dengan anggota yang sudah biasa untuk menunggu perintah dari pemimpin.

Pada bulan Juli 1947, apada saat mengamati jatuhnya Kabinet Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin yang menjadi Perdana Menteri, kepala pemerintah Belanda pada sidang kabinetnya mencatat kemrosotan yang terjadi secara berangsur-angsur dan mantap dalam kekuatan tokoh-tokoh independen dalam politik Indonesia, yang mungkin masih bersedia dan mampu untuk membangun jembatan seperti dikatakan perdana menteri Belanda, "unsur-unsur yang layak dan konstruktif dalam Republik, pertama Syahrir, lalu Amir Syarifuddin."²¹

Sejak peristiwa Madiun, Pemerintah Belanda menahan diri selama lebih dari dua bulan, membiarkan Sukarno dan Hatta menangani Muso dan

²¹ *Ibid*, hal. 673.

Amir Syarifuddin, dengan ekstrem kiri maupun dengan moderat - kiri, kemudian Belanda menyerang kembali²² Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan aksi militer yang kedua.

Pada bulan November 1948, ketika mereka merencanakan kemungkinan ini, Republik memerintahkan menteri ekonominya, Syarifuddin Prawiranegara untuk pindah ke Bukittinggi, Sumatera Barat, dan sekiranya Sukarno dan Hatta tidak dapat melaksanakan tugas, "supaya membentuk pemerintah darurat yang untuk sementara mengambil alih fungsi pemerintah pusat". Syafrudin Prawiranegara membentuk pemerintahnya di Sumatera Barat.

Tanggal 19 Desember 1948, beberapa pejabat Republik hadir di istana Presiden, di saat-saat terakhir sebelum Belanda datang, prajurit mengemukakan kepada pucuk pimpinan, supaya meninggalkan istana dan pergi ke pegunungan untuk memimpin perlawanan bersenjata. Baik Sukarno maupun Hatta menolak gagasan itu, Hatta menjelaskan kemudian, sebagian karena diperlukan pasukan terlalu besar untuk mengawal para pemimpin.²³

²²Pada bulan November 1948, putaran baru dari negosiasi final Persetujuan Renville dimulai. Tanggal 11 Desember 1948 negoisasi gagal lagi, mengenal isu seberapa besar otoritas Belanda dan Republik di Indonesia selama periode sementara sebelum pemindahan kekuasaan.

²³Moh. Hatta, Indonesian Patriot : Memoire. Singapore: Gunung Agung, 1981, hal. 295.

Menurut Soegondo Djojopuspito yang selalu dekat dengan Syahrir dan juga hadir di istana pada saat itu, Syahrir mendukung Sukarno dan Hatta tentang masalah ini.

Selama empat hari mereka ditahan di istana dengan dikawal. Pada hari keempat, Hatta diberitahu

*Bahwa Sukarno, Syahrir, Haji Agus Salim dan para pemimpin lain, yaitu Mr. Assat, Mr. Gafar Pringgodigdo dan Soerjadarma, akan dipindahkan ke tempat lain, meskipun tidak diberi tahu kemana.*²⁴

Pada tanggal 9 Januari 1949 dan 11 Januari 1949, wakil Pemerintah Belanda mengunjungi tahanan dan menawarkan aturan penjara yang lebih santai jika mereka berjanji tidak memakainya untuk aktivitas politik.

Rencana Belanda semula adalah untuk "sedapat mungkin merahasiakan" tempat pemimpin Republik ditawan. Akan tetapi, pada 16 Januari 1949, wakil PBB mengunjungi Hatta di penjaranya di Menunding dan bertanya tentang kemungkinan memulai lagi perundingan. Moh.Hatta enggan. Seperti kemudian ditulisnya, dia memberitahu tamunya bahwa

dia maupun Sukarno sama sekali tidak lagi berwenang sebab pada tanggal 19 Desember 1948 kami sudah menyerahkan pimpinan negara kepada Syafrudin Prawiranegara di Sumatera Barat.

²⁴Moh.Hatta, Memoir, Tintamas, Jakarta, 1978, hal. 542.

Terhadap hal ini, seperti ditulis Hatta, diplomat PBB itu menjawab bahwa

*dunia pada umumnya dan PBB pada khususnya, yang mengakui Sukarno-Hatta sebagai pemimpin Republik Indonesia.*²⁵

Pada tanggal 22 Januari 1949, atas prakarsa Jawaharlal Nehru diadakan lagi konferensi bangsa-bangsa Asia di New Delhi yang menuntut supaya

*anggota pemerintah Republik Indonesia dibebankan dan supaya pemerintah dikembalikan ke Yogyakarta.*²⁶

Pada tanggal 28 Januari 1949, revolusi Dewan Keamanan PBB menuntut supaya gencatan senjata segera diadakan, “**penarikan mundur pasukan Belanda**” ke belakang garis sebelum permusuhan, “**pemilihan bebas.**” Tanggal yang pasti untuk “penyerahan kedaulatan” kepada Indonesia, dan “Komisi PBB yang baru” dengan “**kekuasaan lebih besar**”. Juga, “pemerintah Republik harus dipulihkan di Yogyakarta”. Dalam hal ini, nama Syahrir sama sekali tidak disebut sebagai wakil yang penting.

Pada tanggal 7 Mei 1949, persetujuan Belanda-Indonesia ditandatangani oleh J.H Van Royen dan Moh. Roem. Belanda setuju untuk menarik kembali pasukannya dari daerah di sekeliling Yogyakarta.

²⁵Moh. Hatta, Indonesian Patriot, Gunung Agung, Singapura, 1981, hal. 299.

²⁶Rudolf Mrazek, opcit, hal. 685.

Sebagai ganti, Republik setuju untuk puas dengan hanya sepertiga dari kursi dalam majelis perwakilan federal Indonesia yang akan datang. Pertempuran akan dihentikan di semua front. Para pemimpin Republik akan dibebaskan, dan pembicaraan akhir akan diadakan mengenai penyerahan kedaulatan-Konferensi Meja Bundar di Den Haag, menjelang akhir tahun. Dalam kata-kata George Kahin yang dikutip oleh Rudolf Mrazek

Dikalangan orang Republik yang terpelajar, umumnya dipercaya bahwa persetujuan Roem-Van Royen direkayasa melalui tekanan kuat Amerika atas para pemimpin Republik.²⁷

Pemulihan kembali Republik di Yogyakarta disetujui oleh Roem Van Royen di bulan Mei 1949, dan tanggal kembalinya pucuk pimpinan ditetapkan pada tanggal 6 Juli 1949. Pada tanggal 13 Juli 1949, seperti disepakati, Syafrudin Prawiranegara tiba dan mengembalikan mandatnya kepada Sukarno dan Hatta. Yogyakarta kembali menjadi ibukota Republik Indonesia

Konferensi Meja Bundar dibuka di Den Haag pada 23 Agustus 1949. Hatta memimpin delegasi Indonesia dan dibantu oleh Moh. Roem. Di atau di dekat konferensi ada beberapa pria dan wanita yang diketahui ada hubungan dengan Syahrir.

²⁷ *Ibid.*, hal 699.

Akan tetapi, mereka tidak terlalu penting. Konferensi Meja Bundar berakhir pada tanggal 2 November 1949. Tanggal 27 Desember 1949 disetujui sebagai tanggal kedaulatan diserahkan secara resmi.²⁸

Penyerahan resmi kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan bersamaan di Den Haag, Jakarta dan Yogyakarta. Di Jakarta, Sultan Hamengku Buwono menerima piagam kedaulatan atas nama Indonesia Serikat, di Yogyakarta, Sukarno menerimanya atas nama Republik.

B. Dalam Bidang Ekonomi (1950 - 1959)

Syahrir adalah seorang tokoh sosial demokrat. Dia menyokong gagasan bentuk pemerintah yang dipilih oleh rakyat serta kemerdekaan-kemerdekaan individu dan menurutnya cara terbaik untuk memecahkan persoalan ekonomi Indonesia adalah dengan cara mengangkat mereka dari jurang kemiskinan ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan Sukarno adalah seorang tokoh otoriter yang merasa senang dengan sistem totaliter, apakah jenis fasis ataupun komunis memandang rendah pemerintah dan memandang kesulitan ekonomi Indonesia secara negatif. Perbedaan antara Sukarno dan

²⁸*Ibid*, hal. 704, 707.

Syahrir sangat menyolok dalam persoalan ekonomi.²⁹

Keadaan ekonomi negeri Indonesia pada tahun 1958 buruk sekali. Sumber penghasilan dan pencarian rakyat dan bangsa yang terutama adalah pertanian. Yang dihasilkan adalah terutama bahan makanan, yaitu beras, jagung, ubi kayu, ketela dan sebagainya.

Menurut Syahrir, untuk bercocok tanam itu yang perlu adalah tanah dan negara manusia untuk mengerjakannya. Tanah yang baik untuk ditangani terbatas banyaknya dan tidak pula sama baiknya. Tanah di Pulau Jawa sangat baik, akan tetapi sudah tiada lagi yang belum ditanami atau diusahakan. Tanah yang baik itu sudah penuh sesak dengan manusia dan seperti keadaan sekarang ini hasil yang diperoleh dari pengusahaan tanah itu dengan bercocok tanam sudah jauh tidak mencukupi untuk menjamin kehidupan semua orang yang hidup di atasnya. Maka akan bertambah merajalelalah kemiskinan dan kelapan, jika tidak ditambah penghasilan tiap bidang tanah atau diperoleh sumber-sumber pencarian dan penghasilan yang lain untuk rakyat dan bangsa kita.³⁰

Sumber - sumber kehidupan yang lain bagi rakyat kita seperti

²⁹H.Rosihan Anwar (Ed), Mengenang Syahrir, PT Gramedia, Jakarta, 1980, hal. 296

³⁰Sutan Syahrir, Sosialisme Indonesia Pembangunan, Lappenas, Jakarta, 1982, hal. 134.

kekayaan dari hutan, seperti pengumpulan rotan, gambir, getah hutan dan sebagainya, pencarian dari laut, yaitu perikanan laut ataupun darat, perindustrian dengan perburuhannya serta perdagangannya, semua inipun masih banyak dapat diperbaiki dan dibuat menghasilkan kekayaan serta menambah kemakmuran rakyat kita. Disini pun dapat direncanakan dan diadakan latihan-latihan keahlian serta penanaman modal menurut yang sesuai pula dengan keadaan dan keperluan yang dirasakan, dan ini ditentukan oleh daerah-daerah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pokok-pokok keperluan ekonomi bangsa dan kehidupan rakyat seperti ini di semua negeri yang baru-baru di Asia sekarang dilakukan masing-masing menurut kemampuan dan kesanggupannya. Hanya di Indonesia semua ini sedikit pun tidak mendapat perhatian. Perhatian yang ada itu kurang pula dari apa yang diterima sebagai warisan dari pemerintahan penjajahan Belanda. Selama delapan tahun ini sendi-sendi kehidupan ekonomi bangsa dan rakyat tidak saja disia-siakan, akan tetapi dianggap remeh sama sekali dan akibatnya adalah bahwa ekonomi bangsa kita makin lama makin merosot dan kedudukan ekonomi bangsa asing yang berkulit kuning ataupun putih dibanding dengan kedudukan bangsa dan rakyat kita terus menerus bertambah kuat, sedangkan bangsa dan negara kita terus lebih tergantung pada ekonomi

mereka untuk kehidupannya. Negara lebih tergantung pada hasil pajak langsung dan tidak langsung yang mesti diperoleh dari kaum modal putih dan kuning, serta pula dari devisa yang dihasilkannya dari produksi serta dari perdagangan dengan luar negeri. Minyak tanah, logam-logam, hasil perkebunan, semua itu merupakan sumber penghasilan negara yang penting. Begitu pula negara tergantung pada keahlian bangsa berkulit putih dan kuning. Di dalam kehidupan ekonomi serta juga pada modal yang dapat dikerahkan mereka. Pengaruh mereka atas kehidupan negara dan bangsa inilah yang dimaksudkan oleh orang yang menghendaki dihapuskannya keadaan ekonomi kolonial serta mendirikan ekonomi nasional.

Tentang menambah penghasilan ini ada berbagai pendapat akan tetapi pada semua pendapat itu ada suatu hal yang sama, yaitu bahwa untuk memastikan penambahan penghasilan masyarakat atau bangsa, haruslah segera diadakan berbagai perbaikan pada peralatan penghasilan bangsa. Dengan lain perkataan haruslah diadakan penanaman modal untuknya, baik itu untuk membeli alat-alat produksi atau alat-alat bekerja yang baru, maupun untuk memperbaiki pengairan atau jalan-jalan atau alat penghubung yang lain, seperti perkapalan atau pelabuhan dan lain sebagainya. Ada pendapat yang mengemukakan bahwa pembelian cangkul serta rabuk adalah lebih penting daripada memperbaiki pelabuhan atau pusat tenaga listrik yang

baru. Akan tetapi kedua pendapat itu sama artinya dalam hal bahwa kesemuanya itu memerlukan uang ataupun modal.³¹

Sebelumnya telah digambarkan bagaimana negara dan pemerintah dapat bergiat di lapangan ekonomi dengan mengadakan investasi atau penanaman modal yang langsung pada perusahaan-perusahaan negara dan pemerintah, atau pun yang lebih banyak lagi dengan tindakan dan kegiatan yang tidak langsung yaitu memajukan dan memudahkan perkembangan serta lancarnya jalan kehidupan ekonomi di dalam negeri. Pada umumnya mesti dianggap sebagai tugas pemerintah untuk mengadakan investasi atau penanaman modal dalam lapangan penghasilan yang perlu, akan tetapi dalam jangka panjang tidak akan dapat mengeluarkan devidend atau untung. Hal ini selalu terdapat dalam cabang kegiatan ekonomi yang memerlukan penanaman modal yang luar biasa besarnya, sekaligus memakan tempo yang sangat panjang pula sebelum dapat mulai menghasilkan.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa suatu negeri yang menuju kepada kedewasaan ataupun kemerdekaan yang seluas-luasnya, selalu akan memimpikan memiliki perusahaan pembuatan baja sendiri, supaya dapat pula membuat barang - barang modalnya sendiri, membuat

³¹*Ibid*, hal. 257-258.

lokomotif, traktor kapal dan sebagainya. Dengan sendirinya pula jika hal itu tercapai akan terdapat kemampuan untuk membuat senapan, meriam dan tank sendiri disamping membuat kapal perang dan kapal terbang pemburu serta pembom.³²

Tujuan yang tertinggi politik ekonomi nasional yang difahamkan secara begini, tampaknya tidak dapat lebih dari pada bertukarnya segala perusahaan asing sekarang menjadi perusahaan bumi putera, sedangkan soal-soal yang bersangkutan dengan kemungkinan perubahan atau kemajuan kehidupan ekonomi masyarakat, sama sekali tidak pernah disinggung pada pokoknya.

Secara teoritis perubahan yang diperoleh dengan bertukarnya perusahaan asing atau warga negara menjadi perusahaan Indonesia asli alias bumiputera, mungkin sekali sejalan dengan merosotnya tingkat kehidupan ekonomi, yaitu dengan mundurnya produksi dan dengan berkurangnya penanaman modal atau investasi, malah mungkin dengan "berkurangnya" kekayaan dan modal masyarakat Indonesia. Mungkin juga tidak. Mungkin juga akan dapat diperoleh kemajuan karenanya.

Yang jelas adalah bahwa cara memandang dan berfikir "nasional" dengan pengertian itu, tidak ada sangkutannya dengan soal pembangunan ekonomi untuk masyarakat umumnya, yang harus diukur dengan

³²Ibid., hal. 272-273.

kemungkinan menambah produksi di negeri kita ini, serta cara-cara menggunakan hasil produksi dengan sebaik-baiknya, supaya meluaskan lapangan kehidupan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Maka menurut pandangan yang terakhir ini, kebijaksanaan negara dan pemerintah dalam lapangan ekonomi semestinya ditujukan kepada pengendalian penggunaan dan pemakaian hasil produksi masyarakat melalui perdagangan luar negeri itu sedemikian rupa, sehingga menambah kekayaan negara, memperkuat dasar-dasar kemakmuran. Negara dan pemerintah seharusnya dapat mengendalikan lalu lintas perdagangan itu sedemikian rupa, sehingga memperbesar kemungkinan penanaman modal, menghilangkan barang-barang laka dan membatasi konsumsi yang memang masih dapat dikurangi.

Hal ini dapat berarti, untuk berbagai barang yang sudah jelas tidak berguna untuk masyarakat diberikan izin untuk devisa menurut rencana yang bersangkutan dengan rencana pembangunan umumnya. Disamping itu pembuatan barang-barang di dalam negeri kita sendiri sama dengan menambah kemungkinan investasi dan menambah kekayaan serta kesanggupan produksi masyarakat kita.³³

³³ *Ibid.*, hal. 275-277.

Lawan-lawannya Syahrir, terutama yang terpengaruh oleh propaganda komunis selalu mencapnya sebagai pemuja budak Barat. Tulis Syahrir dalam manifestasinya, "**Perjuangan Kita**" yang dikutip oleh Daniel Dhakidae dalam

Manusia Dalam Kemelut Sejarah

*Sampai saat ini kita hidup di dalam dan dikepung oleh dunia pengaruh imperialistis kapitalistis Amerika dan Inggris, dan bagaimanapun kita akan memeras tenaga, tenaga-tenaga kita dari diri sendiri tidak akan cukup untuk merobohkan dunia pengaruh itu. Selama kita hidup di dunia pengaruh kapitalistis, kita terpaksa menjaga agar kita tidak bermusuhan dengan dunia kapitalis itu, dan itu membawa kesimpulan, bahwa kita harus membuka diri sebagai daerah berkarya mereka.*³⁵

Selama hidupnya Syahrir dikenal sebagai pendukung cita-cita sosialisme kerakyatan yang menolak paham perjuangan kelas, antara kelas pekerja dengan kelas pemilik modal, yang lazim disebut kaum kapitalis. Sosialisme yang tidak bertentangan dengan kemanusiaan, tapi sosialisme yang timbul berdasarkan kesadaran rakyat dan bersifat kerakyatan³⁶

Syahrir juga menolak sistem pemerintahan diktator atau totaliter dalam mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Dengan partainya, Syahrir menanamkan kesadaran pada para pengikutnya di Indonesia, tentang pentingnya faktor manusia dan

³⁵ *Ibid*, hal 88.

³⁶ Syahbuddin Mandaralam, Apa dan Siapa Sutan Syahrir, PT Rosda Jayaputra, Jakarta, 1982, hal. 56.

kemanusiaan dalam mencapai cita-cita Suatu cita-cita yang baik, tidak boleh mengabaikan faktor kemanusiaan sebagai nilai tertinggi dari perjuangan. Tidak ada artinya perjuangan menuju masyarakat sosialisme itu, bila mengorbankan segi-segi kemanusiaan yang beradab.

Sikap kemanusiaan dan kerakyatan yang diperjuangkan Syahrir tidak disukai kaum komunis, karena untuk mencapai tujuan, mereka menghalalkan semua cara. Walaupun dengan mengorbankan kemanusiaan sekalipun. Faktor Syahrir dan partainya, dengan menghambat gerakan PKI menuju ke puncak kekuasaan Setelah kegagalan pemberontakan PKI di Madiun, PKI menyelusup di hampir segala sektor kehidupan masyarakat kita. Orang-orang PKI ada di semua tingkat partai-partai lain, sampai-sampai kedalam kalangan Angkatan Bersenjata.³⁷

Syahrir adalah nasionalis tidak sempit yang melihat ke depan.

Menurutnya :

Keluar, revolusi kita menampakkan dir sebagai revolusi nasional; kedalam, revolusi kita sesuai dengan hukum-hukum demokrasi masyarakat, punya serat-serat sosialis. Jika kita tidak sadar mendalami kenyataan itu, maka apa yang pada saat ini kita perjuangkan, hanyalah tetap tinggal revolusi nasional belaka, penuh pengertian palsu terhadap perubahan-perubahan sosial yang sekarang sedang bekerja dan melaksanakan diri dalam masyarakat kita yang demokratis. Maka ada bahaya besar, kita

³⁷ *Ibid.*, hal. 57.

lalu tidak mengenal kebalik salah satu musuh kita yang mengambil bentuk yang cocok dengan bentuk-bentuk tertentu dari nasionalisme, sehingga nasionalisme kita lalu mendapat raut-raut muka dari sebetuk solidarisme, jelasnya solidarisme feodal atau hirarkis. Dengan kata lain, fasisme musuh terbesar dari kemajuan semua bangsa di bumi ini.³⁸

Syahrir melanjutkan keterangan hal itu dengan beberapa ilustrasi situasi

bangsa kita yang terpokok, yaitu :

Kita hidup dalam suatu dunia dimana tenaga atom sudah dimanfaatkan dengan suatu teknik, suatu organisasi dan ilmu pengetahuan yang sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan dunia di zaman revolusi Prancis. Masyarakat-masyarakat kita sudah mengenal pembentukan-pembentukan crust dan kartel, dan kongsi-kongsi kapitalis minyak dan sebagainya yang membuktikan, bahwa kehidupan revolusi kita adalah revolusi rakyat, kita tidak boleh keliru dan menyamakannya dengan revolusi Prancis..... Prancis dan revolusi Prancis merupakan barisan pelopor dan pandu-pandu dari dunia kapitalis imperialistis, sedangkan revolusi kita harus menyumbang untuk mengakhiri zaman kapitalis imperialis itu, seperti pun perjuangan sosial yang sekarang bergerak dimanapun di dunia ini harus dimengerti sebagai fase terakhir dari sistem kapitalistis-imperialistis..... Dari sebab itu tidak bisa lain, revolusi kita harus bersifat sosial. Suatu kemenangan yang berdasarkan kehormatan nama dan gengsi saja bukanlah suatu kemenangan. Isinyalah yang justru ,enjadi pedoman perjuangan politik kita Sudah banyak terjadi bahwa yang disebut kemenangan nasional hanyalah nama untuk isi yang kita tuju kita perjuangkan.³⁹

³⁸Taufik Abdullah, dkk, *opcit*, hal. 89.

³⁹*Ibid*, hal. 91.

Bagi Syahrir bukanlah mode, melainkan keyakinan pribadi yang datang dari penghayatan pribadinya di Digul_Belanda, untuk mengingatkan, sesudah kemerdekaan RI diakui dunia: **“Kaum terpelajar kita yang menduduki segala pangkat di dalam pemerintahan dan juga terkemuka di dalam lapangan sosial, hingga sekarang masih belum sadar benar akan kedudukannya di dalam masyarakat kita sekarang.”**⁴⁰

Untuk perjuangan sosialis seperti itu dibutuhkan perubahan mental, namun juga dasar pengetahuan yang memadai terutama tentang pelajaran sejarah revolusi-revolusi lain.

⁴⁰*Ibid.*, hal. 92.